

## B A B I

### P E N D A H U L U A N

#### A. Latar Belakang Masalah.

Sejarah perjalanan pemerintahan Indonesia sejak kemerdekaan sampai dengan tahun 1965, diwarnai dengan ketidakstabilan politik. Terganggunya stabilitas politik ini, bersumber dari sistem politik yang dianut, dimana Indonesia menganut sistem banyak partai yang didasarkan pada berbagai aliran dan ideologi. Hal ini menyebabkan lahirnya pertentangan-pertentangan politik, baik yang bersifat pertentangan ideologis, maupun yang bersifat membangkitkan rasa solidaritas golongan, yang pada akhirnya telah menggeser kepentingan nasional di bawah kepentingan golongan dan ideologi yang dianut.

Pada zaman Demokrasi Liberal, ketidakstabilan politik ini ditandai oleh jatuh bangunnya kabinet<sup>1</sup> akibat tajamnya persaingan atau pertentangan politik antara kekuatan (partai-partai) politik yang jumlahnya tidak sedikit itu, perdebatan-perdebatan yang sengit tentang dasar negara dalam Konstituante dan munculnya berbagai macam pergolakan di daerah-daerah.

Sungguhpun Presiden Sukarno telah berusaha menciptakan

---

<sup>1</sup> Charles Lewis Taylor dan M.C. Hudson dalam Word Hand Book of Political and Sosial Indicators, mencatat bahwa dari 25 Kabinet yang memerintah (1945 - 1965) hanya 7 Kabinet yang berhasil memerintah selama 12 sampai 23 bulan. Sementara itu terdapat 12 Kabinet yang berumur antara 6 sampai 11 bulan, dan 6 Kabinet lainnya hanya mampu bertahan di antara 1 sampai 4 bulan. Arbi Sanit, Sistem Politik Indonesia, Rajawali, Jakarta, 1982, hal. 15.

tekan stabilitas politik melalui Demokrasi Terpimpinnya,<sup>2</sup> namun ternyata sampai akhir kekuasaannya stabilitas politik itu tidak pernah terwujud. Ketidakstabilan politik ini ditandai dengan persaingan yang tajam antara kekuatan-kekuatan politik yang ada untuk saling merebut pengaruh -dalam hal ini PKI dan ABRI-AD<sup>+</sup> yang pada puncaknya menyebabkan peristiwa yang kini dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G 30 S/PKI. Bahkan tingkah laku politik Presiden Sukarno dalam Demokrasi Terpimpin ini justru banyak menyimpang dari UUD 1945 dan Pancasila, ia telah membubarkan parlemen hasil pemilihan umum dan menggantinya dengan yang baru yang anggota-anggotanya ditunjuk sendiri, ia tidak pernah mentolerir munculnya perbedaan pendapat bahkan menganggapnya sesuatu hal yang tabu yang pada akhirnya semuanya ini bermuara pada kekuasaan yang otoriter.

Setelah Orde Baru lahir, dua pengalaman traumatis pada zaman Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin ini mendorong pemerintah untuk menata kembali sistem politik yang disant dengan berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Pemerintah merasa perlu

---

<sup>2</sup>presiden Sukarno menilai bahwa terganggunya stabilitas politik dikarenakan berlakunya Demokrasi Liberal dengan sistem banyak partai. Oleh karena itu dalam pidatonya bulan Oktober 1956 Presiden mengemukakan maklumat pemerintah November 1945 yang membuka jalan bagi pembentukan partai-partai, menurut Presiden keputusan pemerintah itu merupakan salah satu kesalahan besar yang pernah diperbuat, beliau berkata bahwa ia akan sangat bergembira jika para pemimpin partai berunding sesamanya dan memutuskan bersama untuk mengubur partai-partai. Dalam kesempatan yang lain Presiden juga mengemukakan sistem Demokrasi Liberal yang katanya diambil dari Barat yang tidak cocok dengan bangsa Indonesia, oleh karena itu pada tanggal 5 Juli 1959 presiden mendekritkan berlakunya kembali UUD 1945 dalam sistem yang dikenal dengan Demokrasi Terpimpin. Lihat Delier Noer, Partai Islam di Pantes Nasional, Grafiti Pers, Jakarta, 1987, hal. 352.

menata kembali kehidupan kepartaian dengan menyederhanakan jumlah partai-partai politik dan menetapkan Pancasila sebagai ideologi negara, karena jumlah partai yang banyak yang didasarkan pada bermacam-macam ideologi dinilai telah menyebabkan terganggunya stabilitas politik yang selanjutnya menyebabkan masalah-masalah pembangunan terbelengklai sebagaimana yang pernah terjadi pada masa lalu.

Untuk maksud itu, pemerintah berusaha menciptakan kondisi yang akan melepaskan jalan menuju proses penyederhanaan partai, diawali dengan anjuran pengelompokan partai-partai dalam lembaga legislatif (DPR) yang akhirnya bermuara pada fusi partai-partai politik tahun 1973, dimana empat Partai Islam yang ada sebelumnya berfusi ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sekalipun pada dasarnya kenyataan ini diterima dengan hati yang berat.

Secara sepintas, fusi PPP nampak mulus dan memberikan harapan bagi masa depan Umat Islam Indonesia dalam peredaran politik. Pada periode awal fusi para pemimpin partai nampak kompak penuh dengan semangat ukhuwah Islamiyah ketika tampil dalam gelanggang politik, terutama dalam menghadapi masalah-masalah yang menyangkut nilai-nilai Islam, sehingga menumbuhkan citra positif bahwa PPP adalah milik Umat Islam, penyelar aspirasi politik serta alat perjuangan cita-cita mereka. Hal ini dapat dilihat pada kasus perjuangan PPP tentang RUU Perkawinan, kemudian sikap PPP tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan Aliran Kepercayaan yang keluar sidang ketika ditetapkannya dua masalah itu dalam sidang Umum DPR tahun 1978.

Namun dalam perkembangan selanjutnya, partai ini tidak dapat mempertahankan kekompekan yang selama ini da-

pet dibina, bahkan timbul perselisihan dan perpecahan antar unsur pendukung partai itu secara berkepanjangan.

Dalam suasana seperti itu, pemerintah dalam rangka mewujudkan stabilitas politik berusaha menetapkan Pancesila sebagai ideologi negara dengan melenapkan gagasan untuk menetapkan pancesila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi kekuatan politik yang ada, karena organisasi kekuatan politik selama ini masih mempunyai asas ciri yang dinilai dapat menimbulkan fanatisme golongan yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas nasional. Gagasan ini kemudian diterima dalam Sidang Umum MPR tahun 1983 oleh semua fraksi tanpa ada hambatan, yang kemudian dituangkan dalam Tap MPR No. II tahun 1983 tentang GBHM. Berdasarkan Tap MPR No. II tahun 1983 ini, PPP dalam akutemanya yang ke I menetapkan untuk menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan Tap MPR No. II tahun 1983 yakni menghilangkan ciri khususnya yakni Islam dan mencantumkan Pancesila sebagai satu-satunya asas partai. Dengan demikian secara formal sudah tidak ada lagi partai yang khusus akan memperjuangkan aspirasi politik umat Islam.

#### B. Penegasan Judul.

Untuk menghindari kesalahfahaman dan sekaligus mendapatkan pengertian terhadap apa yang dibahas dalam skripsi ini, maka perlu ditegaskan judul skripsi ini sebagai berikut :

1. studi ; berasal dari bahasa Inggris "to study" berarti mempelajari, atau juga berarti menyelidiki.<sup>3</sup>
2. partai politik Islam ; Partai politik adalah suatu ke-

---

<sup>3</sup>W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1982, hal. 695.

lompok yang terorganisir, anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan mereka.<sup>4</sup>

Sedang kata "Islam", menunjuk bahwa orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang dimiliki partai tersebut adalah orientasi, nilai-nilai dan cita-cita Islam. Dalam kaitannya dengan pembahasan ini, maka yang dimaksud dengan partai politik Islam adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) setelah empat Partai Politik Islam sebelumnya yakni NU, PSII, PARMUSI dan PERTI berfusi ke dalamnya, karena esensi dari definisi partai politik tersebut juga sesuai bila dihubungkan dengan PPP, dimana PPP merupakan hasil fusi dari empat partai Islam sebelumnya yang kesemuanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama yaitu Islam.

3. Dalam Pemerintahan Orde Baru ; dimaksudkan bahwa partai politik Islam yang menjadi pembahasan skripsi ini adalah berada pada masa Pemerintahan Orde Baru, suatu pemerintahan dalam kehidupan negara Indonesia yang dimulai setelah keluarnya surat perintah 11 Maret 1966 dan masih berlangsung sampai sekarang sebagai koreksi terhadap penyelewengan-penyelewengan pemerintah sebelumnya yang puncaknya ditandai dengan meletusnya Gerakan 30 September / G 30 S/PKI.

Dengan beberapa penjelasan di atas dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah menyelidiki atau mempelajari keberadaan Partai politik Islam dalam pemerintahan Orde Baru.

---

<sup>4</sup>Miriam Budierdjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gra-media, Jakarta, 1982, hal. 160.



### C. Alasan Memilih Judul.

Hal-hal yang berkenaan dengan alasan dipilihnya judul skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Sejak lahirnya pemerintahan Orde Baru, telah terjadi perubahan kehidupan politik. Untuk itu penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana bentuk perubahan kehidupan politik itu serta bagaimana pula proses terjadinya.
2. Partai politik Islam setelah berfusi ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP), pada awal perjalanannya menunjukkan semangat dan kekompakan ketika tampil dalam gelanggang politik sebagai kekuatan politik Islam, namun dalam perjalanan selanjutnya terjadi perpecahan antar unsur pendukung partai itu. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui mengapa kenyataan itu sampai terjadi.
3. Hilangnya eksistensi partai politik Islam sehingga umat Islam tidak lagi mempunyai wadah khusus untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Karena itu penulis ingin mengetahui kemungkinan apa yang dapat dilakukan oleh umat Islam dalam rangka menyalurkan aspirasi politiknya.

### D. Lingkup Bahasan dan Rumusan Masalah.

Pembahasan skripsi ini akan meliputi :

1. Gambaran tentang kehidupan partai politik Islam pada masa awal pemerintahan Orde Baru, kaitannya dengan adanya kebijaksanaan pemerintah tentang penataan kembali kehidupan politik.
2. Gambaran tentang Partai Persatuan Pembangunan sebagai satu-satunya partai politik Islam hasil dari fusi empat partai Islam sebelumnya.

3. Gambaran tentang berakhimnya partai politik Islam dalam kaitannya dengan adanya kebijaksanaan pemerintah tentang penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan politik di Indonesia.

Berkaitan dengan ruanglingkup pembahasan di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Latar belakang serta proses terjadinya perubahan sistem politik dalam pemerintahan Orde Baru.
2. Bagaimana keberadaan partai politik Islam dalam pemerintahan Orde Baru.
3. Dengan berakhimnya partai politik Islam, kemungkinan apa yang dapat dilakukan oleh Umat Islam dalam rangka menyalurkan aspirasi politiknya.

#### E. Tujuan Penulisan.

Penulisan skripsi ini disamping mempunyai tujuan formalitas perkuliahan, juga mempunyai tujuan sebagaimana di bawah ini :

1. Untuk memberikan gambaran latar belakang serta proses terjadinya perubahan sistem politik dalam pemerintahan Orde Baru.
2. Untuk memberikan gambaran tentang kehidupan partai-partai politik Islam sejak awal pemerintahan Orde Baru sampai berakhimnya partai politik Islam.
3. Untuk memberikan gambaran tentang proses berakhimnya partai politik Islam serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan oleh umat Islam dalam rangka menyalurkan aspirasi politiknya sehubungan tidak adanya partai Islam.

#### F. Metode penulisan.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode sejarah,

adapun langkah-langkahnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Heuristik ; yaitu pengumpulan data dari sumbernya,<sup>5</sup> maksudnya kegiatan mengumpulkan data-data yang ada hubungannya dengan skripsi ini dari sumbernya. Adapun sumber data dari pembahasan skripsi ini berupa :
  - a. sumber kepustakaan, yaitu data yang diambil dari buku-buku literatur (buku-buku ilmiah) serta dokumen-dokumen dan majalah-majalah yang ada relevansinya dengan pembahasan skripsi ini.
  - b. sumber lisan, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara untuk melengkapi data yang telah diperoleh dari sumber kepustakaan.
2. Kritik ; yaitu kegiatan untuk menilai data-data yang telah diperoleh, dengan tujuan agar memperoleh data yang otentik (kritik ekstern) dan data yang kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan (kritik intern)<sup>6</sup> agar memperoleh fakta yang dapat mengantarkan pembahasan skripsi ini ke tingkat kebenaran ilmiah.
3. Interpretasi ; yaitu kegiatan untuk menetapkan atau memberikan makna yang saling berhubungan dari fakta-fakta yang telah diperoleh.<sup>7</sup>
4. Historiografi ; yaitu langkah untuk menyajikan hasil penafsiran atau interpretasi atas fakta sejarah dalam bentuk tulisan menjadi suatu kisah.<sup>8</sup> Adapun pola penyajiannya adalah :
  - informatif diskriptif, yakni menerangkan apa adanya dari data yang telah diperoleh.

---

<sup>5</sup>Nugroho Notosusanto, Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer, Yayasan Idayu, Jakarta, 1978, hal. 36.

<sup>6</sup>Ibid., hal. 38 - 39.

<sup>7</sup>Ibid., hal. 40.

<sup>8</sup>Ibid., hal. 42.



- analisis interpretatif, yaitu pola penyajian dengan menggunakan analisa untuk mencapai suatu kesimpulan.

#### G. Sistematika Pembahasan.

Skripsi ini terdiri dari lima bab.

##### Bab Pertama ; Pendahuluan.

Dalam bab ini diuraikan hal-hal yang melatarbelakangi permasalahan, kemudian beberapa penjelasan berkenaan dengan penegasan judul agar tidak terjadi kekeliruan atau kesalahfahaman. Untuk membatasi agar pembahasan ini tidak keluar dari masalah yang telah ditetapkan, maka dijelaskan pula ruang lingkup pembahasan serta rumusan masalahnya. Kemudian agar tujuan penulisan skripsi ini dapat tercapai dengan baik, maka dalam bab ini dijelaskan juga metode penulisan yang dipergunakan. Dan akhirnya untuk memudahkan dalam memahami pembahasan skripsi ini maka dijelaskan juga sistematika pembahasannya.

##### Bab ke dua ; Partai-partai Politik Islam dalam Awal Pemerintahan Orde Baru.

Bab ini menguraikan tentang sejarah lahirnya Orde Baru, kemudian membahas Penataan partai-partai politik dan selanjutnya membahas kehidupan partai-partai politik Islam dalam awal Pemerintahan Orde Baru.

##### Bab ke tiga ; Partai-partai politik Islam berfusi ke dalam Partai Persatuan Pembangunan.

Dalam bab ini akan diuraikan tentang proses penyederhanaan partai, kemudian membahas PPP sejak fusi sampai pemilu 1977 kemudian dilanjutkan dari pemilu 1977 sampai pemilu 1982.

##### Bab ke empat ; Berakhirnya Partai Politik Islam.

Pembahasannya meliputi penetapan Pancasila sebagai asas tunggal, kemudian PPP setelah penetapan Pancasila sebagai

esas tunggal dan akhirnya aspirasi politik Umat Islam setelah berakhirnya partai Islam.

Bab ke lima ; Kesimpulan dan penutup.